



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Interpelasi Hambalang Bakal Menguat
Tanggal : Jumat, 16 November 2012
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Interpelasi Hambalang Bakal Menguat

JAKARTA – Pengajuan hak interpelasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, diperkirakan bakal menguat.

Sebab, mayoritas fraksi di DPR menyatakan setuju atas rekomendasi Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR yang telah selesai melakukan telah atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai proyek tersebut. "Sebagai komitmen untuk memperbaiki tata kelola politik anggaran kita, saya akan mendorong Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mendukung usulan BAKN DPR untuk menggunakan hak bertanya (interpelasi) kepada pemerintah mengenai kasus Hambalang," tandas Sekretaris FPAN Teguh Juwarsono di Jakarta kemarin.

Menurut dia, pijakan untuk digulirkannya hak interpelasi

sudah sangat kuat karena sudah ada hasil audit investigasi BPK dan rekomendasi resmi dari BAKN DPR.

Seperti diketahui, BAKN DPR sudah menyelesaikan telah atas audit investigasi BPK mengenai proyek pembangunan P3SON di Hambalang, Bogor. Salah satu rekomendasi BAKN yang diserahkan ke pimpinan DPR adalah meminta untuk dipergunakan hak bertanya, yakni hak interpelasi, atau jika perlu hak angket kepada pemerintah.

Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta juga menilai dari segi dasar, sangat kuat masalah tersebut digunakan oleh DPR untuk mengajukan

ambil keputusan," katanya.

Adapun Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy juga belum bisa menyampaikan sikap fraksinya di DPR atas usulan hak interpelasi kasus Hambalang. "Nanti kapan dibahas duludifraksi awal masa sidang," ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kasus korupsi di Hambalang tidak bisa begitu saja lepas dari tanggung jawab DPR. Dia menilai DPR tetap memiliki peran dalam meloloskan proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. "Lolosnya proyek Hambalang ada juga peran DPR. Pertama, DPR punya peran meloloskan, kedua proses adanya proses pengajuan ke Menteri Keuangan (Menkeu). Itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan DPR," tandasnya.

Burhanuddin mengatakan, kejanggalan yang dilakukan

kan hak bertanya kepada pemerintah. Namun, dia lebih menyerahkan padamekanisme di DPR, yaitu hak interpelasi tetaplah harus melalui mekanisme pengusulan oleh anggota dengan persyaratan yang telah ditetapkan. "Ada mekanismenya, ada usul. Kalau segitiga faktanya, interpelasi," katanya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, BAKN adalah lembaga serius dalam mengaudit keuangan negara. Karena itu, ketika BAKN dalam kesimpulan telahnya mengusulkan agar DPR menggunakan hak bertanya berupa interpelasi, tentu itu akan menjadi pertimbangan seriushakynya.

Selain tiga fraksi itu, PDIP sebelumnya juga sudah menyatakan sependapat dengan hasil telaah BAKN DPR yang merekomendasikan agar DPR menggunakan hak bertanya dalam kasus Hambalang.

Ketua Fraksi Partai Kebang-

garan proyek pembangunan P3SON Hambalang ini.

Hal itu tampak dari hasil telaah BAKN terhadap hasil audit BPK pada proyek pembangunan P3SON Hambalang. Karena itu, dia menyatakan, KPK perlu didorong secara politis untuk menyelesaikan kasus Hambalang ini.

"Pimpinan BAKN menyoroti Mempora atas penyimpangan proyek ini, yang saat ini sedang diselidiki KPK. Kami mendorong KPK bisa menyelesaikan kasus ini, apalagi beberapa data dan fakta yang ada diaudit investigasi BPK dan telaah BAKN DPR saat ini sudah bisa membantu proses penyelidikan dan penyidikan," tandasnya.

Pihaknya juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana proyek Hambalang ini. Hal itu bisa dilakukan melalui laporan audit investigasi BPK.

• rahmat sahid/ *kaan DPR F*

"Saya akan mendorong Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mendukung usulan BAKN DPR untuk menggunakan hak bertanya (interpelasi)."

TEGUH JUWARNO
Sekretaris FPAN

kitan Bangsa (FPKB) Marwan Ja'far belum bisa memberikan kepastianapakahfraksinyamenyadukung rekomendasi BAKN DPR untuk penggunaan hak interpelasi. Meski menjadi bagian dari pihak yang ikut memutuskan di BAKN DPR, sejauh ini FPKB belum mendapatkan laporan secara jelas dari anggotanya yang gagadidiBAKN DPR. "Kita masih akan melihat dulu laporannya, kita pelajari, baru kita